

FISHERMEN CONFLICT AND THE RESOLUTION FOR USING FISHERIES RESOURCES UTILIZATION AT SELAYAR ISLANDS, SOUTH SULAWESI

KONFLIK NELAYAN DAN RESOLUSI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PULAU SELAYAR, SULAWESI SELATAN

Andi Adri Arief^{*1}, Harnita Agusanty², and Muh. Dalvi Mustafa³

^{1,3}Departement of Fisheries Faculty of Marine Science and Fisheries, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia, 90245

²Faculty of Agricultural, Muhammadiyah University, Makassar, Indonesia 90221

Received: February 23, 2020 /Accepted: April 26, 2020

ABSTRACT

This research aims to analyze the existence of fishermen conflicts in using of fisheries resources and settlement conflict resolution. The method used is qualitative research through grounded research that explores various cases and forms of conflict between fishermen (hulle fishermen communities (migrants) with local fishermen. Data analysis refers to the functional structural theory and conflict theory. The result of the research shows that the fishermen or groups of fishermen with their capture technologies (traditional, semi-traditional, and modern) must compete freely and be competitive to get fishery resources. The orientation and utilization of spatial aspects also be a type of conflict that extends to primordial conflict aspects. Conflict resolution through co-management strategies by involving various stakeholders in conflict resolution. Strategic steps must be an emphasis on conflict resolution shape that adaptive and responsive through systematic analysis for acceleration the resolution of fisherman conflict issues that developed so far. The formation of fishermen institutions conflict management is needed that involves government elements (related institution), community leaders, fishermen representative, NGO, and universities in charge of potential analyzing fishermen conflicts and handling strategy.

Keywords: fishermen, small island, conflict resolution, fisheries resources.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi konflik nelayan dalam pemanfaatan sumber daya ikan dan resolusi penyelesaian konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui *grounded research* yang mengeksplorasi berbagai kasus dan bentuk konflik antar nelayan, komunitas nelayan *hulle* (pendatang) dengan nelayan lokal. Analisis data mengacu pada teori struktural fungsional dan teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan atau kelompok-kelompok nelayan dengan teknologi penangkapan yang dimilikinya (tradisional, semi-tradisional dan modern) harus bersaing secara bebas dan kompetitif untuk mendapatkan sumberdaya perikanan. Adanya orientasi dan aspek ruang pemanfaatan juga menjadi jenis konflik yang meluas ke aspek konflik primordial. Resolusi konflik melalui strategi co-manajemen dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam penyelesaian konflik. Langkah strategis harus ditekankan pada bentuk penyelesaian konflik yang adaptif dan responsif melalui analisis yang sistematis untuk mempercepat terjadinya penyelesaian atas isu-isu konflik nelayan yang berkembang selama ini. Pembentukan kelembagaan penanganan konflik nelayan dibutuhkan yang melibatkan unsur pemerintah (instansi terkait), tokoh masyarakat, perwakilan nelayan, LSM, dan perguruan tinggi yang bertugas menganalisis potensi-potensi konflik nelayan serta strategi penanganannya.

Kata kunci: nelayan, pulau kecil, resolusi konflik, sumberdaya perikanan.

* Corresponding author: Andi Adri Arief, andi_adriunhas@yahoo.com

Department of Fisheries Faculty of Marine Science and Fisheries, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia, 90245.

PENDAHULUAN

Faktor-faktor sumber konflik nelayan di wilayah pulau-pulau kecil adalah meningkatnya intensitas eksploitasi sumber daya yang berkaitan erat dengan pertambahan unit alat tangkap, pertambahan penduduk (*demografi*), lapangan kerja, perubahan tingkat komersialisasi (permintaan pasar) yang diiringi oleh perubahan teknologi, serta kondisi ekologis sumberdaya yang semakin terbatas dan tidak produktif lagi. Dengan demikian, berkonflik merupakan instrumen yang paling sering digunakan nelayan dalam mengatasi krisis relasi sosial menuju ke kondisi ekuilibrium nilai dan norma sosial sebagai pemecahan masalah (Pollnac, 1984).

Hasil penelitian LIPI tahun 2015, menginformasikan bahwa dengan perilaku nelayan yang tidak bertanggung jawab dalam aktivitas penangkapan menyebabkan terumbu karang mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan lebih 70 persen di Kabupaten Spermonde, Sulawesi Selatan. Hal ini diduga telah lama dilakukan oleh nelayan, yang diawali oleh saat permintaan ikan karang baik mati maupun hidup sangat meningkat. Ikan karang seperti ikan kerapu dan napoleon dalam kondisi hidup sangat laku dipasaran (*Life Reef Fish Trade/LRFFT*), menjadikan perburuan ikan karang semakin hari semakin meningkat (eksporasi dan eksploitasi), termasuk di perairan Sulawesi Selatan. Dari sepuluh tahun yang lalu, nelayan telah menggunakan cara-cara penangkapan ikan karang yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan obat bius *sodium cyanide* dan bom. Tingginya harga ikan karang di negara-negara tujuan ekspor seperti; Jepang, Hongkong, Cina, Taiwan dan sebagainya, telah menarik nelayan melakukan ekspansi daerah tangkapan di berbagai wilayah perairan pulau-pulau kecil yang masih potensial dengan kondisi terumbu karang yang belum mengalami kerusakan permanen. Dukungan pengusaha ikan (*pappalele*) memberikan modal produksi untuk memburu rente ekonomi juga semakin intensif (Abdurrahim, Wahyono, Sudiyono, & Arief, 2015).

Kepulauan Selayar merupakan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu kabupaten kepulauan. Kondisi wilayah yang sangat potensial dalam pemanfaatan sumber daya perikanan telah melahirkan konflik *laten* secara horizontal antar nelayan pendatang dan nelayan lokal dalam perebutan sumberdaya yang *open acces* tersebut. Interpretasi terhadap otonomi daerah No 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32/2004 memberikan implikasi terhadap proteksi sumber daya perikanan bagi nelayan dari luar daerah akibat sekat-sekat otonomi yang diciptakan. Konteks perebutan sumber daya wilayah pesisir dan lautan semakin bermuara kepada terjadinya konflik nelayan secara terbuka berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Di satu pihak mengasumsikan diri menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan mereka (nelayan lokal) dan dipihak nelayan pendatang merasa memiliki kepentingan mendapatkan sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan. Bahkan konfliknya melebar kepada perebutan wilayah potensial, terutama pada daerah kabupaten / kota pesisir yang mempunyai gugus kepulauan yang potensial.

Konflik nelayan yang terjadi di wilayah pulau-pulau kecil harus dijadikan *entry point* untuk mengetahui permasalahan dalam memanfaatkan suatu sumber daya milik bersama (*common*

property) yang *open acces*. Dengan demikian, kajian-kajian mengenai konflik kenelayanan sangat dibutuhkan untuk menemukan formula yang terintegratif dalam mengelola konflik secara arif dan bijaksana sebagai realitas pada komunitas nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan merekomendasikan resolusi penyelesaian konflik nelayan di wilayah perairan pulau-pulau kecil.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Mei 2019 di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasi dipilih secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan konflik nelayan yang pernah dan masih terjadi saat ini dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Secara spesifik wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Bontoharu. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Secara konseptual dikatakan bahwa peneliti sosial sering berbicara tentang studi kasus, yang memusatkan perhatian pada satu atau beberapa contoh dari beberapa fenomena sosial, seperti desa, keluarga, atau geng remaja (Babbie, 2004). Fenomena konflik nelayan yang terjadi di wilayah administrasi Kecamatan Bontoharu dijadikan sebagai titik setral penelitian. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi literatur, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Penggalan data primer melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan kuisioner difokuskan pada jenis konflik, persepsi informan terhadap konflik serta berbagai norma sebagai kesepakatan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Informan penelitian adalah orang-orang yang berprofesi sebagai *pongawa*, *pa'palele*, tokoh masyarakat, dan *sawi* dengan asumsi mereka mengetahui permasalahan yang diteliti. Penggunaan teknik *snowball* dipraktekkan dan tetap mengacu pada prinsip triangulasi (Milles & Huberman, 1992).

Penyatuan teori struktural fungsional dan teori konflik dijadikan sebagai pendekatan analisis data berdasarkan kerangka analisis Lewis A Coser (Poloma, 1979). Secara teoritis dikatakan bahwa meskipun beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dari konsensus tetapi struktural pelaku konflik juga terbentuk bersama dengan dampaknya. Teori konflik neomaxis dipergunakan untuk menganalisis sumber dan proses konflik nelayan yang melihat bahwa konflik tidak hanya karena kelas yang berbeda serta penguasaan *capital*, namun unsur psikologi dimana perbedaan idea seseorang lebih berperan dari kondisi fisiknya juga sebagai perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Bontoharu

Kecamatan Bontoharu dijadikan sebagai wilayah kecamatan penelitian dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Benteng. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Benteng dan laut Flores, bagian timur berbatasan dengan laut banda dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bontosikuyu. Terdiri dari 6 desa dan 2 kelurahan, yaitu; Desa Bontolebang, Desa Bontosunggu, Desa Bontoborusu, Desa Kalepadang, Desa Bontotangnga, dan Desa Kahu-Kahu. Sementara

Kelurahan Bontobangun dan Kelurahan Putabangun adalah dua kelurahan yang dimaksud. Ibu kota Kecamatan Bontoharu terletak di Kelurahan Bontobangun. Luas wilayah Kecamatan Bontoharu adalah 129,75 km² atau 9.56 % dari luas wilayah Kabupaten. Berdasarkan data statistik Kecamatan Bontoharu tahun 2018, populasi penduduknya sebanyak 11.801 jiwa (BPS, 2018).

Kondisi topografi pada kawasan ini yang mencakup tujuh desa cukup bervariasi dengan kemiringan lereng antara 0-2 %, 2- 15 %, 16-40 %, >40 %. Kondisi topografi kawasan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Letak Desa, Ketinggian dari Permukaan Laut dan Jaraknya

Kelurahan/ Desa	Letak Desa		Jarak (Km)		Ketinggian (mdpl)
	Pantai	Bukan Pantai	Dari Ibukota Kecamatan	Dari Ibukota Kabupaten	
Bontoborusu	Pantai		9	11	0-25
Bontolebang	Pantai		6	3	0-25
Bontosunggu	Pantai		7	10	0-25
Bontobangun	Pantai		0	3	0-25
Putabangun		Bukan Pantai	6	3	0-25
Bontotangnga	Pantai		4	7	0-25
Kahu-Kahu	Pantai		10	12	0-25
Kalepadang	-	Bukan Pantai	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Selayar, Diolah (2018)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, nelayan di wilayah penelitian sebagian besar merupakan nelayan tradisional masih melakukan penangkapan hanya di sekitar perairan pantai. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai daerah-daerah penangkapan tersebut berkisar antara setengah jam sampai satu jam. Ditemukan bahwa nelayan-nelayan lokal (Pulau Gusung; Desa Bonto Lebang; Pulau Dongkalang; Desa Bontoborusu dan Pulau Kahu-Kahu; Desa Kahu-Kahu) memiliki alat tangkap yang berbeda-beda seperti; pancing (*hand line*), bubu (*portabel trap*), *gill net* (jaring insang) dan sero (*guiding barrier*). Ikan target bagi nelayan seperti ikan karang dan ikan pelagis kecil memiliki kawanan dan selalu berkoloni dan sering kali berpindah-pindah tempat. Sementara daerah *fishing ground* ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, kadang dekat kadang jauh bahkan yang terjauh melintasi perairan negara tetangga (Malaysia).

Pola aktivitas nelayan sebagai praktek mata pencaharian hidup dalam melakukan kegiatan perikanan tangkap masih bersifat tradisional, mengakibatkan penggunaan-penggunaan sarana dan alat yang digunakan pada kegiatan perikanan tangkap masih bersifat sederhana. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa nelayan di Pulau Gusung (Desa Bonto Lebang); Pulau Dongkalang (Desa Bontoborusu) dan Pulau Kahu-Kahu (Desa Kahu-Kahu) menggunakan perahu atau kapal motor tidak bermesin (sampan, perahu layar) dan yang bermesin berukuran sampai 30 pk. Jenis perahu motor *jarangka* dilengkapi mesin rata-rata berkekuatan 4.5 pk sampai 16 pk, sementara perahu jenis *jolloro* yang menggunakan mesin ukuran 20 pk sampai 30 pk. Dapat disimpulkan bahwa usaha perikanan tangkap di wilayah penelitian masih didominasi oleh usaha perikanan skala kecil, dan hanya sedikit yang bergerak pada usaha skala menengah. Pengetahuan masyarakat tentang

nilai ekonomi ikan karang yang ditransaksikan baik pasar lokal, regional maupun pasar internasional tertampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikan Karang yang Memiliki Nilai Ekonomis Penting di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Istilah/ Nama Lokal	Jenis Ikan	Harga Pasaran Ikan Hidup
1.	MC	Sunu Merah	Mahal
2.	CP	Cappang (Kerapu)	Sedang
3.	Tiger	KerapuMacan	Mahal
4.	CPK	Kerapu Merah	Mahal
5.	TKS	KerapuTikus	Mahal
6.	Mosso	Kerapu Lumpur	Sedang
7.	Pappa	Sunu	Mahal
8.	Bebi	Campuranjenisikan (0,3 – 0,5 kg)	Murah
9.	Langkoe	Napoleon (dilindungi)	Mahal

Sumber: Nelayan Pulau (2019).

Keterangan: Bebi : 0,3 – 0,5 kg (Rp 125.000 – Rp 175.000)
 Super : 0,6 – 1 kg (Rp 200.000 – Rp 350.000)
 Ekoran Kecil : 1 – 3 kg (Rp 350.000 – Rp 450.000)
 Ekoran Besar : 3 – 5 kg (Rp 800.000 – Rp 1.000.000)

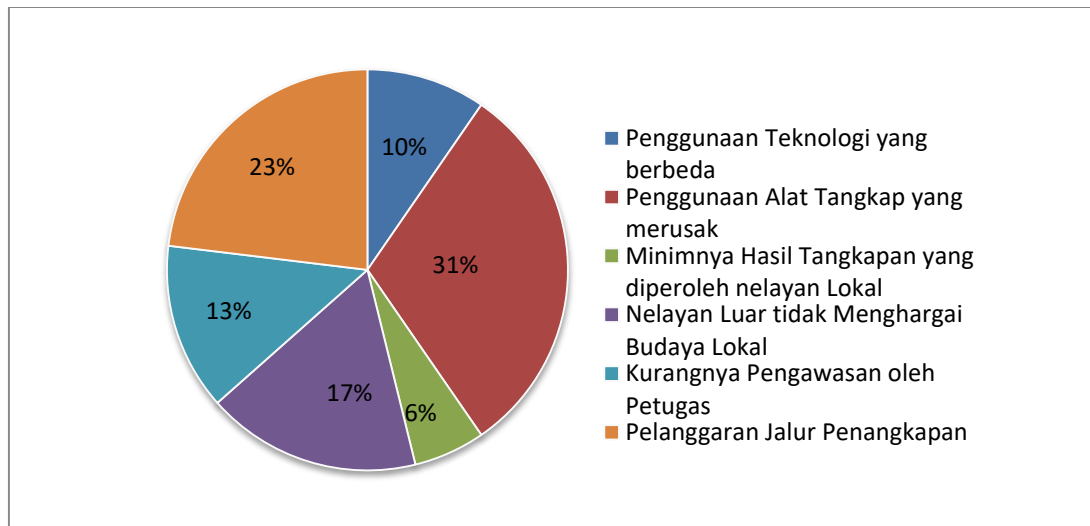
Puncak permintaan ikan karang hidup baik pasar lokal maupun pasar internasional adalah bulan Februari setiap tahun bertepatan dengan perayaan hari raya imlek. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng sebagai ibu kota kabupaten sebagai sentra penampungan ikan karang hidup untuk dipasarkan ke Kota Makassar dan Bali. Kurang lebih 13 ton per bulan atau sekitar satu ton lebih per bulan transaksi perdagangan ikan karang hidup dilakukan. Harga jual rata-rata sekitar Rp 350.000 – 800.000./kg.

Eksistensi Konflik Nelayan: Sumber, Kronologi, Jenis dan Aktor

Realitas dalam kehidupan masyarakat, konflik merupakan suatu gejala sosial yang melekat di dalam kehidupan sehingga melekat pula di dalam pemanfaatan ruang dengan derajat dan pola konflik yang berbeda. Dengan demikian, ragam, pola serta sumber penyebab konflik juga berbeda dan bersifat lokal serta spesifik. Isu-isu umum mengenai konflik yang berpontesi terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: konflik kelas, konflik ini terjadi antar kelas (antar kelompok) sosial yang berbeda seperti konflik antara kelompok nelayan tradisional dengan nelayan modern. Konflik ini terjadi akibat perebutan daerah penangkapan (*fishing ground*) karena tingkat penguasaan modal, teknologi, dan peralatan yang berbeda. Konflik yang terjadi karena perbedaan tujuan dalam pemanfaatan sumberdaya alam diistilahkan sebagai konflik orientasi. Sementara konflik spasial terjadi akibat adanya perebutan wilayah/ruang yang terkait dengan batas-batas administrasi pemerintahan (Fisher S, Abdi, R, & S, 2000).

Teridentifikasi isu-isu konflik terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah perairan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain adalah: adanya perbedaan teknologi penangkapan ikan yang dipergunakan; perbedaan cara atau metode penangkapan ikan; aspek sosial ekonomi masyarakat; pelanggaran jalur penangkapan; penggunaan alat/bahan yang merusak lingkungan ekologi; hasil tangkapan yang berkurang bagi nelayan lokal; dugaan menurunnya ketersediaan sumberdaya perikanan; pelanggaran jalur tangkapan bagi nelayan

pendatang; masalah atau dianggap masalah untuk nelayan *hulle* (nelayan pendatang) bagi nelayan lokal; sistem pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif, sosialisasi dari berbagai peraturan perundang – undangan tentang pengelolaan laut dan sumberdayanya yang belum terpahami dengan baik bagi nelayan lokal dan pendatang (andong). Beberapa hal inilah yang di duga kuat sebagai pemicu konflik yang terjadi selama ini bagi nelayan lokal (nelayan di Kepulauan Selayar) dengan nelayan pendatang (nelayan dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan, seperti; Kabupaten Bone, Takalar, Bulukumba, Sinjai, Bone dan sebagainya). Persepsi informan mengenai sumber penyebab konflik nelayan disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2019

Gambar 1. Persepsi Informan Mengenai Sumber Penyebab Konflik Nelayan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh keterangan mengenai kronologis konflik antara nelayan dari berbagai kabupaten dengan nelayan lokal di Kabupaten Selayar. Gambaran konflik yang terjadi tersajikan berdasarkan tahun kejadiannya yang ditampilkan secara berurutan, yaitu: 1) pada tahun 2008, nelayan ikan karang dengan nelayan *purse seine*. Nelayan *hulle* atau andong (pendatang) kurang disambut baik jika melaut di daerah Kepulauan Selayar. Hal tersebut disebabkan karena nelayan *hulle* diduga menggunakan bom ketika menangkap ikan di wilayah Selayar, konflik masih bersifat *laten*. 2) Pada tahun 2009, nelayan *hulle* diduga menjadi penyebab utama rusaknya terumbu karang di wilayah perairan Selayar, sehingga terjadi pengusiran dan pembakaran alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan lokal. Padahal, menurut nelayan pendatang hanya sebagian kecil nelayan *hulle* (pendatang) yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. 3) Pada tahun 2010, terjadi razia alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan lokal, karena diduga nelayan *hulle* (pendatang) menggunakan ukuran yang tidak sesuai sehingga banyak penyu di Selayar yang tertangkap padahal penyu merupakan biota yang dilindungi. 4) Pada tahun 2011, nelayan dari Kabupaten Bulukumba dianggap melewati batas wilayah penangkapan yang ditetapkan oleh pihak Kabupaten Selayar sehingga terjadi penahanan kapal dan membuat nelayan dari Kabupaten Bulukumba mengajukan protes. Kapal nelayan Bulukumba ditahan di Selayar dan menyebabkan nelayan Bulukumba lainnya menjadi marah dan terjadi kekerasan fisik. Nelayan dari Kabupaten Bulukumba melakukan penutupan jalur menuju Selayar. 5) Pada tahun 2013, pengusiran

nelayan pukat (*pagae*) dari Kabupaten Sinjai oleh nelayan dari pulau Pasitanete. 6) Pada tahun 2014, pelarangan pemasangan rumpong di wilayah penangkapan nelayan Pulau Pasitanete dan larangan pelintasan/penangkapan di wilayah tangkapan nelayan lokal Selayar. 7) Pada tahun 2018, terjadi konflik sesama nelayan lokal. Nelayan dari Desa Mekar Indah diduga menggunakan pukat (*pagae*) dan melewati batas dari jalur penangkapan, yakni 2 (dua mil) dari bibir pantai oleh nelayan pemancing tradisional dari Desa Barugaia. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian Agusman, *et al* di Kabupaten Minahasa. Karena perbedaan modal dan penguasaan teknologi penangkapan serta ketidakjelasan jalur penangkapan masing-masing alat tangkap sehingga nelayan nelayan tradisional di Desa Borgo yang kalah bersaing baik modal maupun teknologi merasa mengalami ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan dengan nelayan *pajeko*. Konflik tersebut teranalisis sebagai konflik upaya tangkap antara nelayan tradisional dengan nelayan semi modern (kapal *soma pajeko*) di perairan pesisir yang seharusnya menjadi wilayah penangkapan nelayan tradisional berdasarkan aturan (Agusman, Victoria E.N, & Jardie A, 2017).

Melalui penelusuran kronologi konflik nelayan yang terjadi di wilayah penelitian, maka analisis dimensi konflik dapat dikaji dalam tiga bagian, yakni; wujud konflik, luas penyebaran, dan intensitasnya. Adapun dimensi konflik nelayan antara nelayan *hulle* atau andong dengan nelayan lokal disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Dimensi Konflik yang Terjadi

No	Dimensi Konflik	Keterangan
1	Wujud Konflik	Wujud konflik yang terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan <i>hulle</i> /andong tergolong ke dalam konflik <i>laten</i> yang kemudian muncul sebagai konflik <i>manifest</i> yang berawal dari insiden penangkapan nelayan <i>hulle</i> , maka konflik-konflik <i>laten</i> tersebut menyeruak kelapangan dan menjadi konflik <i>manifest</i> untuk kasus-kasus yang menyangkut aktivitas penangkapan ikan di kedua belah pihak.
2	Penyebaran Konflik	Sangat tinggi, karena konflik yang pada umumnya hanya melibatkan golongan nelayan kemudian meluas ke masyarakat umum dan sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik priomordial.
3	Intensitas Konflik	Sangat tinggi, karena hamper setiap tahun terjadi konflik antara nelayan pendatang dan nelayan lokal dengan skala yang parsial.

Sumber: Data Primer (2019)

Dapat tersimpulkan bahwa jenis konflik yang terjadi dan aktor yang terlibat didalamnya saling mempengaruhi satu sama lain dan bersifat kompleks, sehingga terjadinya satu peristiwa konflik dapat menjadi penyebab konflik yang lain. Proposisi ini sama dengan yang ditemukan oleh Antoni Wijaya bahwa keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh nelayan, seperti; keterbatasan dalam mengakses modal dan teknologi, tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan mereka hanya mampu menggunakan teknologi tradisional dalam melakukan aktivitas penangkapan dan mengakses wilayah penangkapan yang terbatas sesuai kapasitas mesin perahu yang mereka miliki. Sementara nelayan semi modern atau moderen tidak mematuhi jalur penangkapan yang telah ditetapkan berdasarkan kapasitas mesin perahu dan penggunaan alat tangkap, menyebabkan wilayah yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan tradisional juga dimasuki oleh nelayan semi modern atau modern. Perebutan sumber daya perikanan di wilayah yang sama menyebabkan

nelayan tradisional tersingkir akibat kalah dalam penggunaan teknologi. Kondisi inilah yang menimbulkan terjadinya konflik nelayan dalam perebutan sumberdaya perikanan. Disamping itu, peran pengawasan yang tidak efektif oleh institusi-institusi terkait dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran aturan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, menyebabkan adanya rasa ketidakadilan bagi nelayan tradisional dan menjadi potensi konflik yang sifatnya latensi dan akan mencuat menjadi konflik yang sifatnya manifest (Wijaya, Rochmah, & Ismani, 2009). Jenis konflik nelayan di wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Konflik Nelayan di Wilayah Penelitian

No	Jenis Konflik	Unsur-Unsur	Isu dan Fakta yang Menguatkan Jenis Konflik
1	Konflik Kelas	Ada persaingan antara alat tangkap tradisional dan moderen	Tinggi
2	Konflik Orientasi	Perbedaan orientasi pasar dengan nilai-nilai tradisional	Lemah
3	Konflik Agraria	• Ada perebutan wilayah penangkapan • Pihak yang berkonflik berasal dari wilayah yang berbeda	Tinggi
4	Konflik Primordial	Perbedaan identitas sosial budaya	Sedang

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019)

Indikator penggolongan konflik ke dalam skala yang lemah, sedang dan tinggi dianalisis dari unsur-unsur yang terdapat pada konflik tersebut. Apabila tidak semua unsur terpenuhi, maka konflik masih berada dalam skala yang sangat lemah dan lemah. Tetapi, bila semua unsur-unsur terpenuhi, maka konflik berada dalam skala yang tinggi. Tersimpulkan bahwa desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui undang-undang otonomi daerah juga dapat menjadi sumber penyebab konflik dalam perebutan daerah penangkapan (Satria, 2003). Secara empiris memperlihatkan bahwa interpretasi (tafsiran) terhadap simbol-simbol identitas terkait cukup signifikan dalam pemahaman sebagian besar nelayan atas hak suatu wilayah tertentu (Adhuri & Ary, 2005). Kondisi ini juga terjadi pada kelompok nelayan di Kabupaten Selayar yang merasa berhak sepenuhnya untuk menjaga wilayah perairan mereka dari praktek penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dari luar daerah atau pendatang yang mereka duga banyak merusak keberlanjutan dari sumberdaya perikanan dan lingkungan.

Perbedaan terhadap penguasaan alat produksi menjadikan terbaginya dua kelas dalam masyarakat, yaitu: kelas borjuis dan kelas proletar, yang dapat menimbulkan konflik. Perbedaan kelas ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang dilihat dari kekuatan dan hubungan produksi. Konflik yang terjadi ini bersifat mendalam dan sulit diselesaikan karena tidak hanya terdapat pada cara hidup melainkan juga cara berfikir (Marx, 1965).

Resolusi Konflik Nelayan

Resolusi konflik diperlukan karena solusi-solusi konflik yang telah dilakukan sebelumnya belum terlalu efektif dalam meredam konflik nelayan yang terjadi selama ini. Diperoleh keterangan bahwa solusi konflik nelayan pada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya hanya berbentuk perjanjian penyelesaian konflik dan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

pihak-pihak yang berkonflik. Sudah saatnya dalam penyelesaian konflik nelayan yang terjadi harus dalam kerangka formula yang sistimatis dan regulatif. Dengan demikian diperlukan semacam analisis yang mendalam agar isu-isu konflik tidak menjadi perulangan yang berkali-kali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan formula dalam penyelesaian konflik nelayan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Tahap Masukan. Pada tahapan ini terdapat pengelolaan konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pada kasus nelayan *hulle*/pendatang dan nelayan lokal, yang menjadi inisiator dalam penyelesaian konflik berasal dari pihak pemerintah yakni dari pemerintah daerah dari masing-masing pihak dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 2) Analisis pendahuluan terhadap konflik perikanan. Dimaksudkan untuk mengetahui dimensi konflik, agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik nelayan mampu diidentifikasi mengenai batasan-batasan dan skala yang terdapat dalam konflik.
- 3) Melibatkan pihak yang terkait dalam proses. Dengan adanya identifikasi pihak yang terkait, maka dapat diketahui pihak-pihak mana saja yang dapat melakukan pengelolaan konflik serta seberapa besar perannya untuk melakukan penanganan konflik.
- 4) Analisis *stakeholders* konflik. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi individu-individu yang terkait dengan konflik dan memperjelas peranan individu-individu tersebut dalam penyelesaian konflik.
- 5) Identifikasi terhadap opsi pengelolaan konflik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pilihan yang tepat dalam pengelolaan konflik. Langkah awalnya dilakukan dengan mengevaluasi pilihan yang terkait dengan pengelolaan konflik sebelumnya serta memilih strategi pengelolaan konflik yang sesuai dengan criteria konflik yang terjadi. Pada akhirnya, semua pilihan dalam pengelolaan konflik akan berujung pada suatu bentuk penyelesaian konflik yang ideal.
- 6) Persetujuan terhadap strategi pengelolaan konflik. Pada dasarnya persetujuan terhadap strategi pengelolaan konflik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana ekspektasi dari para pihak yang melakukan pengelolaan konflik.
- 7) Negoisasi terhadap persetujuan. *Stakeholders* konflik melakukan negoisasi berdasarkan kebutuhan bersama yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan cara membuat suatu kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak guna mengakhiri konflik. Musyawarah dan kerjasama merupakan kunci utama dalam penyelesaian konflik yang terjadi.
- 8) Implementasi persetujuan. Implementasi dilakukan dengan cara menerapkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah penerapannya dilakukan, barulah *stakeholders* konflik melakukan pengawasan serta monitoring secara partisipatif. Pada dasarnya pengawasan serta monitoring secara partisipatif dilakukan semua pihak guna mencegah terjadinya konflik yang sama.
- 9) Evaluasi, pembelajaran dan antisipasi turunan konflik. Tahap ini merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dalam resolusi konflik. Evaluasi dilakukan dengan tujuan bahwa kesepakatan yang telah dibuat sudah efektif diimplementasikan atau tidak. Evaluasi ini sangat menentukan keberhasilan suatu bentuk pengelolaan dan penanganan konflik.

Konflik nelayan ini telah merefleksikan adanya kesan kuat keinginan kelompok masyarakat nelayan pengguna alat tangkap tradisional untuk terlibat dalam penataan kawasan perairannya, untuk melindungi kawasan perairannya dari berbagai bentuk aktivitas pemanfaatan sumberdaya laut yang dapat mengancam kelestariannya, serta dalam upaya melindungi nelayan setempat dari persaingan yang tidak seimbang dalam memperebutkan sumberdaya perikanan.

Dalam tataran teoritis, fenomena konflik nelayan yang terjadi di Kecamatan Bontoharu, menunjukkan adanya perbedaan dari teori yang dikemukakan oleh Lewis Coser. Jika suatu konflik itu menyangkut "*nonrealistic issues*" seperti keyakinan dan ideologi, maka konflik itu akan bersifat brutal (*violent*). Sebaliknya, jika konflik itu menyangkut masalah "*realistic issues*", yakni tujuan yang bisa dicapai, maka konflik itu kurang brutal karena dapat dilakukan kompromi antar pihak yang berkonflik (Lewis A, 1956). Kasus konflik nelayan di Kecamatan Bontoharu menunjukkan ketajaman konflik yang ada pada tataran *violent* (brutal) seperti membakar alat tangkap, saling menyerang dengan kekerasan fisik dan sebagainya. Padahal isu konfliknya bukan masalah "*non realistic issues*", tetapi isunya bersifat realistik dan bisa dikompromikan.

Terdapat pengecualian berdasarkan teori Coser, bahwa meskipun isu konfliknya "*realistic issues*" tetapi jika ada yang menyangkut masalah "sumber nafkah" atau masalah mata pencaharian, atau di masyarakat sangat familiar diistilahkan sebagai "masalah perut", maka konflik yang terjadi cenderung akan bersifat brutal (*violent*). Proposisi ini nampaknya bukan khas konflik kenelayanan di kecamatan ini saja, tetapi fenomena empiriknya berlaku juga bagi berbagai konflik lainnya, baik dikalangan nelayan maupun non nelayan di Indonesia. Oleh karena itu, program pemberdayaan nelayan; relokasi nelayan; pengembangan usaha alternatif; peningkatan nilai tambah produksi perikanan; pengelolaan perikanan berkelanjutan dan berbasis masyarakat; sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif harus terus digalakkan di masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, agar mampu menjadi peredam terhadap gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik baik yang sifatnya laten maupun manifes (Isa, Muzni, & Suryanto, 2012).

Dengan demikian, pemikiran dan aksi mengatasi konflik nelayan dalam perebutan sumber daya perikanan laut, harus mampu mensinergikan aspek sosial-budaya dan kepentingan ekonomi masyarakat nelayan dalam satu kerangka penyelesaian. Strategi harus berposisi pada prinsip keadilan baik terhadap nelayan maupun terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi konflik nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan disebabkan oleh: variabel-variabel teknologis dimana nelayan atau kelompok-kelompok nelayan dengan teknologi penangkapan yang dimilikinya (tradisional, semi-tradisional dan moderen) harus bersaing secara bebas dan kompetitif untuk mendapatkan sumber daya perikanan; keterkaitan dengan orientasi dan aspek ruang pemanfaatan juga menjadi jenis konflik yang meluas ke aspek konflik primordial. Resolusi konflik melalui strategi co-manajemen dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam penyelesaian konflik.

Langkah strategis harus ditekankan pada bentuk penyelesaian konflik yang adaptif dan responsif melalui analisis yang sistematis untuk mempercepat terjadinya penyelesaian atas isu-isu konflik nelayan yang berkembang selama ini. Pembentukan kelembagaan penanganan konflik nelayan yang melibatkan unsur

pemerintah (instansi terkait), tokoh masyarakat, perwakilan nelayan, LSM dan perguruan tinggi diperukan untuk menganalisis potensi-potensi konflik nelayan serta strategi penanganannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada nelayan di Kecamatan Bontoharu atas kerjasamanya dalam pengambilan data. Kepada Bapak/Ibu staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar atas kerjasamanya dalam penyediaan data sekunder perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A. Y., Wahyono, A., Sudiyono, & Arief, A. A. (2015). Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Kabupaten Selayar. Jakarta: Coremap-CTI Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Adhuri, D. S., & Ary, W. (2005). Fishing in, Fishing out : Memahami Konflik-Konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur. Jakarta: LIPI Press.
- Agusman, Z., Victoria E.N, M., & Jardie A, A. (2017). Analisis Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Desa Borgo Kecamatan Tombaririk Kabupaten Minahasa. Jurnal Akulturasia , 5 (9), 717-725.
- Babbie, E. (2004). The Practice of Social Research. USA: Thomson Wadsworth.
- BPS, S. (2018). Kepulauan Selayar dalam Angka. Selayar: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Fisher S, I. D., Abdi, L. J., R, S., & S, W. (2000). Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.
- Isa, W., Muzni, A. I., & Suryanto. (2012). Model Pengembangan Resolusi Konflik Nelayan Pantai Utara Jawa Timur. Jurnal Psikosains , 4 (2), 55-77.
- Lewis A, C. (1956). The Fungtions of Social Conflict. New York: The Free Press.
- Marx, K. (1965). Capital Vol I and II. London: J.M. Dent and Sons Ltd.
- Milles, M. B., & Huberman, M. A. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pollnac, R. B. (1984). Investigation Territorial Use Right Among Fisherman. In Maritim Institutions in the Western Pasific. Osaka: National Museum of Ethnology.
- Poloma, M. M. (1979). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satria, A. (2003). Konflik Nelayan di Jawa Timur : Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten. Bogor: Makalah.
- Wijaya, A., Rochmah, S., & Ismani, H. (2009). Manajemen Konflik Sosial dalam Masyarakat Nelayan : Studi Kasus Pertentangan dan Pertikaian Nelayan Tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan Nelayan Moderen di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu. Jurnal Wacana , 12 (2), 351-369.